

ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI PROGRAM PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG

(Studi kasus Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
di Dinsosnangkis Kota Bandung)

Yuyun Mulyati¹⁾ Muhammad Ridwan Caesar²⁾ Ellia Purnama³⁾ Rima Nur Rahmat⁴⁾

¹⁾ Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari

²⁾ Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari

³⁾ FISIP Universitas Al-Ghifari

⁴⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bandung

E-mail : ¹⁾ mulyati.yuyun@unfari.ac.id, ²⁾ .caesar.fisip13@gmail.com

³⁾ elliapurnama43@gmail.com ⁴⁾ rimar9919@gmail.com

ASBTRAK

Fokus Penelitian ini adalah terhadap Gelandang dan Pengemis (Gepeng) yang berkeliaran di jalanan di kota Bandung. Penambahan jumlah gepeng cukup signifikan, tahun 2018 terdapat 88 Gepeng meningkat menjadi 297 pada tahun 2019, yang berdampak pada keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan serta timbulnya masalah sosial yang perlu dilakukan penanggulangan dan pembinaan terhadap Gepeng oleh dinas terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Strategi dalam Program Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan mencari sumber data, observasi, dan teknik wawancara terhadap para informan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Hasil penelitiannya adalah penerapan Manajemen Strategi Richard Rumelt (1980), : Kesesuaian (*Consonance*) Keunggulan (*Advantage*) Konsistensi (*Consistency*) Kelayakan (*Feasibility*), pada program di Dinas Sosial belum dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terbukti adanya Gepeng baru yang menimbulkan masalah baru sehingga konsistensinya perlu adanya penanggulangan. Tindakan solusi yang dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat, melakukan bimbingan sosial dan menambah fasilitas pendukung program tersebut. Kendala pelaksanaan program tersebut adalah rendahnya tingkat kesadaran dan sikap mental gepeng. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa program tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, bimbingan sosial sudah dilaksanakan dan ditujukan untuk para Gepeng namun berkesan monoton. Saran penulis perlu dilakukan adanya modifikasi program pelatihan dan keterampilan serta menambah fasilitas penampungan Gepeng yang memadai.

Kata Kunci: PMKS, gepeng (gelandangan dan pengemis), manajemen strategi.

ABSTRACT.

The focus of this research is Midfielders and Beggars (Gepeng) who roam in the city of Bandung. The addition of the number of slums is quite significant, in 2018 there were 88 slums in 2019 increasing to 297, which has an impact on the safety and comfort of road users and social problems that need to be addressed and fostered by the relevant agencies. This study aims to determine the Strategic Management in the Program for Handling People with Social Welfare Problems (PMKS), at the Department of Social Affairs and Poverty Management in Bandung.

The research method used is descriptive qualitative, by looking for data sources, observations, and interview techniques to informants related to the object under study.

The results of his research are that the implementation of Richard Rumelt's (1980) Strategic Management: Conformance (Advantage) Consistency (Consistency) Feasibility, the program at the Social Service has not been implemented properly, it is proven that there is new sprawl that causes problems new so that its consistency needs to be overcome. Solution actions are carried out by providing skills training according to interests and talents, providing social guidance to Gepeng, and adding supporting facilities for the program. The obstacle in implementing the program is the low level of awareness and flat mental attitude. The conclusion from this research is that the program has not run as it should, social guidance has been implemented and is aimed at the gepeng but seems monotonous. The author's suggestion is to modify the training and skills program and add adequate Gepeng shelter facilities.

Keywords: PMKS, homeless (bums and beggars), Strategic Management.

PENDAHULUAN

Masalah sosial merupakan permasalahan yang ada di semua negara tidak terkecuali di Indonesia. Tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia merupakan salah satu masalah social yang harus ditanggulangi oleh dinas terkait. Dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan dibentuklah suatu Program Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 dan dengan perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Gelandangan dan pengemis (Gepeng) merupakan bagian dari program ini yang menjadi pusat perhatian pemerintah di kota Bandung yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat pada Pasal 16 ayat (1). Dengan terbitnya PERDA tersebut menekankan bahwa gelandangan dan pengemis dilarang keras melakukan kegiatan di jalanan karena dapat mengganggu fasilitas jalan umum, pemandangan bahkan aktivitas pengguna jalan.

Gepeng adalah orang yang melakukan kegiatan di jalanan dengan menjadi manusia badut yang berkeliaran di jalanan, seorang wanita dewasa yang membawa anak usia dini dengan baju lusuh, anak-anak jalanan dengan baju lusuh membawa kemoceng dan meminta-minta pada pengguna jalan dan lain sebagainya. Aktivitas Gepeng di jalanan tersebut menjadi sumber penghasilan utama atau sebagai profesi bahkan ada yang mengorganisir.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki wewenang serta bertanggung jawab dalam hal penanganan permasalahan sosial di Kota Bandung, dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat masalah kurangnya pegawai sehingga kurang efektif dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yang membutuhkan bimbingan social, kurang peduli pada penanganan dan penanggulangan gelandangan dan pengemis selama dilakukan bimbingan dan rehabilitasi. Fasilitas yang kurang memadai sehingga gelandangan dan pengemis murni (normal badan dan mental) dijadikan satu kamar dengan para gelandangan dan pengemis yang memiliki masalah kejiwaan atau disabilitas.

Dalam menunjang keberhasilan mengatasi permasalahan tersebut, perlu melakukan program manajemen strategi dalam setiap langkah penanganan Gepeng, yang dilaksanakan dengan proses yang dimulai dari perencanaan, implementasi, serta pengendalian satu strategi organisasi, menentukan misi dan tujuan organisasi agar tercapai tujuan, melalui program “Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)”, yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. sebagai fasilitator, harus mampu melakukan serangkaian program untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandung.

Beberapa peneliti terdahulu sudah melakukan kajian mengenai permasalahan tersebut.

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa indikasi masalah yang berkaitan dengan Program Manajemen Strategi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, diantaranya sebagai berikut:

1. Masih kurangnya konsistensi Program Manajemen Strategi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dengan situasi dan kondisi di jalanan Kota Bandung. Hal ini terlihat dari tabel 1.2 sbb:

Tabel 1.2 Jumlah Gelandangan dan Pengemis

No	Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	gelandangan	27	180	110
2	Pengemis	61	117	162
Total		88	297	272

Sumber: Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, di olah oleh peneliti, 2021

Pada Tabel 1.2 diatas memperlihatkan data gelandangan dan pengemis terdaftar di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada tahun 2018 berjumlah 88 orang, kemudian mengalami kenaikan sebesar 70% pada tahun 2019, yaitu menjadi 297 orang. .

2. Kurangnya optimalisasi penyesuaian program keterampilan yang diberikan untuk

Gepeng dengan minat dan bakatnya. Hal ini terlihat dari setelah mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan, belum adanya perubahan dalam monetisasi (sumber penghasilan) bagi Gepeng dalam menghasilkan uang sebagai sumber penghasilan. Hal ini, membuat sebagian besar Gepeng Kembali melakukan aktivitas di jalanan.

3. Masih kurang optimalnya pelayanan program bimbingan sosial dalam memberikan peluang Gepeng untuk menyelesaikan permasalahan sosialnya. Kegiatan yang monoton serta tidak ada ketersinambungan program.

Dalam table 1.3 berikut ini menyajikan jumlah gepeng yang kurang terlayani dalam periode triwulan selama 2 tahun berturut-turut:

Tabel 1.3 Data Gelandangan dan Pengemis yang sudah mendapatkan bimbingan (dalam triwulan)

Pelayanan Gelandangan dan Pengemis	Tahun	I	II	III	IV
	2018	-	-	120	-
2019	-	-	120	-	
2020	-	-	-	22	

Sumber: Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, di olah kembali oleh peneliti, 2021

Pada tahun 2018 triwulan ke-tiga terdapat 120 Gepeng yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan sosial. Kemudian pada tahun 2019 triwulan ke-tiga gepeng yang sudah mendapatkan bimbingan sebanyak 120 orang, akan tetapi pada tahun 2020 di triwulan ke empat hanya sebanyak 22 orang gepeng yang mendapatkan bimbingan.

Terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 81%.

4. Belum optimalnya fungsi bangunan Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) sebagai ruangan penampungan bagi para Gepeng.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Manajemen Strategi Program Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung".

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Anggara (2019: 11): "Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik".

Menurut Handayadiningrat (2002: 2) dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen", yang berdasarkan pendapat dari seorang ahli Ordway Tead: mengemukakan pengertian administrasi sebagai berikut: "Administrasi sebagai suatu proses dan ada yang bertanggungjawab terhadap penentuan tujuan, dimana organisasi, dan manajemen digariskan, dan sifatnya menentukan suatu garis dari pada suatu kebijakan dan pemberian penghargaan (*general policies*)". Menurut pengertian tersebut bahwa administrasi merupakan proses pertanggungjawaban terhadap

tujuan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.

Menurut Robbins yang dikutip oleh Anggara (2019: 134) mengemukakan pengertian administrasi sebagai berikut: *“Administration in the universal process of vilocioncy getting activities completed with and through other people* (administrasi adalah keseluruhan proses dan aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dan melalui orang lain”. Maka dari pemaparan tersebut bahwasanya administrasi adalah serangkaian proses atau aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi yang dilakukan dua orang atau lebih agar efisien.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan dua orang atau lebih (kelompok) dalam suatu ikatan kerjasama yang dapat berupa pembagian tugas secara rasional untuk mencapai tujuan bersama.

B. Administrasi Negara

Administrasi Negara merupakan segala macam hal kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan berupa kesejahteraan masyarakat itu sendiri. administrasi negara menurut Dimock and Dimock yang dikutip oleh Anggara (2019: 134). Pengertian Administrasi Negara adalah sebagai berikut: “Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya”.

Administrasi negara dapat dikategorikan sebagai aparatur pemerintahan dimana merekalah institusi yang mengatur kenegaraan, lalu selanjutnya administrasi negara memiliki kegiatan melayani yang dimana rakyat yang menjadi target pemerintahan serta administrasi negara mengatur teknis penyelenggaraan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan.

Pengertian Administrasi Publik, definisi administrasi publik atau negara adalah serangkaian teori dan proses dalam segala aspek bidang yang berhubungan dengan pemerintahan untuk mencapai tujuan berupa pelayanan prima pada masyarakat.

C. Tinjauan Manajemen, Strategi dan Manajemen Strategi

Menurut Pfiffner yang dikutip oleh Sukarna (2011: 2) pengertian manajemen adalah: *“Management is concerned with the direction of these individuals and functions to achieve ends previously determined”*, artinya, manajemen bertalian dengan pembimbingan orang-orang dan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Evancevich yang dikutip oleh Isnati&Fajriansyah (2019: 2), pengertian manajemen adalah sebagai berikut: “Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain guna mencapai hasil tujuan yang tidak dapat dicapai oleh hanya satu orang saja”.

Strategi menurut Chandler yang dikutip oleh Isniati&Fajriansyah (2019: 3) sebagai berikut: “Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang”.

Pengertian manajemen strategi, menurut Wheelen dan Hunger yang dikutip oleh Isniati & Fajriansyah (2019: 3-4) menyebutkan bahwa: “Manajemen Strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, yang mana manajemen strategik meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategik atau perencanaan jangka panjang), evaluasi dan pengendalian”.

Terdapat empat tolak ukur yang digunakan untuk menguji manajemen strategi menurut Rumelt yang dikutip oleh Isniati&Fajriansyah (2019: 126) adalah sebagai berikut:

1. *Consistency* (Konsistensi): strategi tidak boleh menghadirkan sasaran dan kebijakan yang tidak konsisten.
2. *Consonance* (Penyesuaian): strategi harus merepresentasikan respons adaptif terhadap lingkungan eksternal dan terhadap perubahan penting yang mungkin terjadi.
3. *Advantage* (Manfaat): strategi harus memberikan peluang bagi terjadinya pembuatan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif dalam suatu wilayah aktivitas tertentu (terpilih).
4. *Feasibility* (kelayakan): strategi tidak boleh menggunakan sumber-sumber

secara berlebihan yang dapat menimbulkan persoalan baru yang tidak terpecahkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dengan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan dan ciri khas yang terdapat pada objek penelitian.

Penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan dengan cara menempuh suatu analisis atau penelitian (*research*) masalah yang ada dengan langkah-langkah yang sistematis.

1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell dalam Research Design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed (2010: 37), mengemukakan bahwa: “Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi”.

2. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data yang telah didapatkan selama observasi yaitu data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan judul serta bukti dari masalah yang diangkat.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018: 244) mengemukakan bahwa, “Teknik Analisis

Data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses mengumpulkan data untuk menjadi satu secara ringkas dengan memilah hal-hal pokok, penting serta valid agar dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam artian lain

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah dilakukan sebuah reduksi data yaitu penyajian data.

c. Verifikasi (*Verification*)

Langkah terakhir setelah disajikannya data yaitu melakukan sebuah verifikasi data atau yang disebut dengan penarikan kesimpulan. Dimana dalam metode penelitian kualitatif kesimpulan tersebut merupakan sebuah penemuan baru yang sebelumnya belum pernah dipaparkan.

d. Triangulasi

Teknik triangulasi sebagai bentuk uji validitas data atau mengecek keabsahan suatu data.

4. Penentuan Informan

Informan merupakan subjek atau orang-orang yang mampu memberikan sejumlah informasi yang diperlukan oleh peneliti karena yang paling memahami situasi dan

kondisi instansi terkait. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Informasi Kunci (*Key Informan*)

Yaitu mereka yang lebih mengetahui mengenai fokus atau masalah pokok yang dibahas serta memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Sebagai informasi kunci adalah; Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kepala UPT Pusat Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial (PEKSOS).

b. Informan Pendukung

Adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan. Informan pendukung dalam menyusun penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Informan Penelitian	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	1	Key informan/ Informan utama
2.	Kepala UPT Pusat Kesejahteraan Sosial	1	Key informan/ Informan utama
3.	Pekerja Sosial (PEKSOS)	2	Key informan/ Informan utama
4	Gepeng	3	Informan Pendukung
5.	Masyarakat Pengguna Jalan	2	Informan Pendukung
6.	Petugas Kecamatan/Wilayah Setempat & Satpol PP	2	Informan Pendukung
	Total	11 orang	

Sumber: di olah Peneliti, 2021

6. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang terletak di Jalan Babakan Karet Belakang Rusunawa Rancacili, Kelurahan Derwati, Kecamatan

Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian dilakukan pula di beberapa titik Gepeng beroperasi.

Penelitian ini dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pengujian selama 9 bulan, yaitu pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Strategi Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Manajemen strategi merupakan salah satu faktor penting yang harus diterapkan setiap instansi baik pemerintahan maupun swasta. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung merupakan instansi pelaksana pemerintahan, yang melaksanakan perancangan dan melakukan aksi nyata melalui sebuah program manajemen strategi dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Dinsosnangkis harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti *consistency* (konsistensi), *consonance* (penyesuaian), *advantage* (manfaat), dan *feasibility* (kelayakan) sebuah program manajemen strategi untuk meminimalisir kemungkinan gelandangan dan pengemis kembali ke jalanan.

Program manajemen strategi yang diterapkan di Dinsosnangkis Kota Bandung sebenarnya sudah dinilai baik namun belum cukup efektif dalam penerapannya. Adapun

hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan alat ukur yang peneliti gunakan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. *Consistency* (Konsistensi)

Dinsosnangkis Kota Bandung, selaku pemangku kebijakan dari pemerintah pusat diberi mandat untuk melakukan pelaksanaan serangkaian program untuk mencapai tujuan pemerintah dalam hal penanggulangan gelandangan dan pengemis yang mengganggu pengguna jalan di Kota Bandung. Diperkuat dengan banyaknya Gepeng berkeliaran di jalan raya untuk mencari uang/nafkah di jalanan yang mengganggu lingkungan dan membahayakan Gepeng itu sendiri juga orang lain. Kondisi ini membuat aparat harus melakukan penertiban terhadap para Gepeng, akan tetapi pada pelaksanaannya mengalami kesulitan untuk ditertibkan. Keadaan yang terjadi adalah semakin bertambahnya jumlah Gepeng yang beroperasi di jalanan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya konsistensi penanggulangan gelandangan dan pengemis, terlihat dari jumlah gepeng mengalami naik dan turun selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian bermunculannya jenis gepeng baru di Kota Bandung yang ikut menambah daftar panjang penanggulangan Gepeng tersebut.

Petugas Satpol PP sebagai bagian dari aparat pemerintah yang juga melakukan tugas dalam menertibkan para Gepeng yang berkeliaran di jalanan. Gepeng yang sudah ditertibkan kemudian dibawa untuk

mendapatkan rehabilitasi. Beberapa Gepeng yang tidak merasa nyaman setelah ditempatkan di tempat rehabilitasi akhirnya mereka kembali menjadi Gepeng. Jumlah Gepeng yang direhabilitasi di Dinsosnangkis Kota Bandung tersebut adalah angka yang terdaftar tidak sesuai dengan jumlah Gepeng yang di rehabilitasi. Pada kenyataannya hanya sebagian atau sedikit jumlah Gepeng di Kota Bandung yang mengikuti rehabilitasi. Setelah Kembali menjadi Gepeng, maka bermunculan fenomena jenis gelandangan dan pengemis baru.

2. *Consonance* (Penyesuaian)

Strategi harus merepresentasikan respons adaptif terhadap lingkungan eksternal dan terhadap perubahan-perubahan penting yang mungkin terjadi. Dalam hal ini manajemen strategi program penanggulangan gelandangan dan pengemis harus mengupayakan tindakan-tindakan yang bersifat menyesuaikan dengan harapan dan keinginan sasaran, mengingat gelandangan dan pengemis yang terbiasa hidup dan mencari nafkah di jalanan.

Pada program penanggulangan gelandangan dan pengemis, terdapat kegiatan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh dalam meningkatkan keterampilan diri. Program tersebut berupa pelatihan-pelatihan seperti membuat sepatu, menjadi montir, memasak dan lain sebagainya. Program keterampilan diri tersebut memiliki tujuan agar para gepeng

mampu membangun usahanya sendiri. Namun, kurangnya penyesuaian dengan bakat yang dimiliki oleh gelandangan dan pengemis serta tidak adanya monetisasi masih menimbulkan kontradiktif, dimana gepeng tersebut lebih memilih kembali ke jalanan setelah dilakukannya pelatihan keterampilan. Ada beberapa Gepeng yang ingin berhenti melakukan kegiatan di jalanan, namun karena menjadi Gepeng merupakan kegiatan dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mencari uang di jalanan sebagai Gepeng menjadi satu-satunya cara dalam memenuhi hal tersebut.

Dinsos sudah cukup baik dalam memberikan kegiatan untuk Gepeng agar tidak terus berkeliaran di jalanan. Namun mental para Gepeng masih ingin kembali di jalanan. Pada dasarnya gelandangan dan pengemis terdapat keinginan untuk berhenti, namun karena minimnya pekerjaan membuat mereka kembali ke jalanan. Pelatihan keterampilan yang diberikan Dinsosnangkis memang sudah cukup baik namun kurangnya penyesuaian pelatihan dengan minat dan bakat.

3. *Advantage* (Manfaat)

Strategi harus memberikan peluang bagi terjadinya pembuatan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif dalam suatu wilayah melalui aktivitas tertentu. Hal ini berkaitan dengan penerapan program penanggulangan gelandangan dan pengemis, dimana program tersebut harus memberikan pelayanan yang dapat

memberikan peluang untuk meningkatkan keunggulan kompetitif gelandangan dan pengemis dalam menjalani kehidupannya dan terlepas dari dunia jalanan. Pada prakteknya masih ditemukan beberapa indikasi masalah dalam pelayanan bimbingan sosial gepeng dalam menyelesaikan masalah-masalah sosialnya, kegiatan bimbingan sosial yang seharusnya dilaksanakan per-triwulan tidak dilakukan secara berkala, materi pelatihan yang terkesan monoton membuat kurang menarik minat gelandangan dan pengemis. Bimbingan sosial yang diberikan itu lebih kepada pemahaman bela negara. Gepeng yang mengikuti program rehabilitasi ini pada dasarnya hanya karena dasar “ikut-ikutan” saja, bukan karena keinginannya untuk berubah lebih baik. Hanya sedikit Gepeng yang serius mengikuti program..

Pelaksanaan program bimbingan sosial yang diberikan kepada Gepeng oleh Dinsosnangkis Kota Bandung sudah cukup baik, namun karena rendahnya tingkat kesadaran atau mental gepeng terhadap bimbingan sosial yang diberikan serta anggaran yang terbatas membuat pelaksanaan program bimbingan sosial tidak bisa dilakukan secara berkala dan terkesan monoton.

4. *Feasibility* (kelayakan)

Strategi tidak boleh menggunakan sumber-sumber secara berlebihan di luar kemampuan dan tidak boleh menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak terpecahkan. Dalam hal ini sebuah

manajemen strategi program penanggulangan gelandangan dan pengemis diharuskan menggunakan sumber atau hal-hal yang tidak menghadirkan persoalan baru. Kelayakan sebuah program menjadi entitas nyata dalam mencapai keberhasilan tujuan sebuah organisasi dalam menangani masalah. Jumlah SDM yang masih kurang serta minimnya dan kurang memadainya fasilitas serta bangunan khusus gepeng menimbulkan belum bisa dilakukan pengklasifikasian gepeng murni serta non murni dalam penampungannya di Puskesmas, sehingga Gepeng murni dan non murni disatukan dalam satu kamar yang sama dengan jumlah rehabilitasi yang cukup banyak. Terlihat data SDM di Dinsosnangkis pada table 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6 Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2020

No.	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1.	PNS Struktural	23
2.	PNS Non Struktural	25
3.	Pekerja Sosial	21
4.	Perawat	5
Total		54

Sumber: Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, diolah peneliti

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian mengenai “Manajemen Strategi Program Penanggulangan

Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan Manajemen Strategi Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sudah cukup baik, namun masih menemukan beberapa masalah yang perlu diatasi, hal ini ditandai oleh: (1) *Consistency* (Konsistensi), yaitu bermunculannya fenomena jenis Gepeng baru. Sehingga menimbulkan masalah dimana jumlah Gepeng yang mengalami kenaikan; (2) *Consonance* (Penyesuaian). Dalam hal ini masih terdapat masalah dalam hal penyesuaian pelatihan dengan minat dan bakat dikarenakan program keterampilan sudah diatur dan tidak berdasarkan masukkan dari gelandangan dan pengemis tersebut. Selain itu, tidak adanya monetisasi (perubahan sesuatu agar dapat menghasilkan uang), sehingga hal ini menjadi alasan gelandangan dan pengemis untuk kembali ke jalanan; (3) *Advantage* (Manfaat). Dinsosnangkis Kota Bandung sudah melaksanakan dengan baik dalam hal pelaksanaan program bimbingan sosial yang diberikan kepada Gepeng. Namun terkendala dengan rendahnya tingkat kesadaran atau mental Gepeng sehingga bimbingan sosial yang diberikan tidak dapat diikuti dengan baik. Keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan program bimbingan sosial belum bisa dilakukan secara berkala

dan pemberian materi yang membosankan sehingga menjadi monoton; dan (4) *Feasibility* (kelayakan). Fasilitas dan bangunan Puskesmas di Dinsosnangkis Kota Bandung sudah cukup baik, Gepeng yang direhabilitasi sudah diklasifikasikan berdasarkan usia dan permasalahan sosialnya. Namun dikarenakan fasilitas yang masih minim berbanding dengan dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang masuk cukup banyak, maka menimbulkan masalah dalam menempatkan Gepeng murni dan non-murni.

Hambatan dalam mencapai Manajemen Strategi Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinsosnangkis Kota Bandung yaitu sebagai berikut: (1) Kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung menyebabkan kurang luasnya penjangkauan gelandangan dan pengemis; (2) Kurangnya Fleksibilitas Perencanaan Anggaran Program. (3) Degradasi Mental Gepeng yang menyebabkan kurangnya kesadaran dalam memotivasi diri untuk meningkatnya kesejahteraan hidup dengan usaha yang lebih baik; dan (4). Kompleksitas permasalahan latar belakang gelandangan dan pengemis, dan fasilitas di tempat rehabilitasi yang belum memadai

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mencapai Manajemen Strategi Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial

dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yaitu sebagai berikut: (1) Upaya yang dilakukan dalam menangani masalah kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yaitu melalui layanan kedaruratan, hambatan kurangnya sumber daya manusia dapat teratasi melalui bantuan relawan untuk menanggulangi masalah turun-naiknya jumlah gelandangan dan pengemis; (2) Menambah jumlah kuota penerima kegiatan keterampilan dan menambah program lainnya untuk para Gepeng agar meminimalisir rasa bosan dari materi yang diberikan; (3) Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan degradasi mental gelandangan dan pengemis oleh Dinsosnangkis Kota Bandung yaitu dilakukan upaya penjangkauan sosial dengan memberikan himbauan persuasif secara langsung dengan mendatangi lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat gelandangan dan pengemis beraksi; dan (4) Fasilitas yang masih kurang yang menyebabkan ketidaknyamanan gelandangan dan pengemis sebagai penerima manfaat di rumah singgah sementara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung perlu membangun sinergi yang baik dengan dinas atau pihak-pihak yang berkaitan

dengan penanggulangan gelandangan dan pengemis, seperti halnya dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Satpol PP, masyarakat, TNI, Polri dsb.

2. Perlu melakukan kajian perencanaan anggaran sesuai peninjauan kebutuhan program yang dibutuhkan oleh gelandangan dan pengemis, agar meminimalisir kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang sering terjadi.
3. Meningkatkan kualitas bimbingan sosial dari segi materi maupun pemateri serta meninjau ulang permasalahan yang dimiliki oleh para Gepeng sangat penting dilakukan, agar setiap program bimbingan sosial dapat bermanfaat dan tepat sasaran.
4. Melakukan peninjauan secara berulang terhadap latar belakang para Gepeng di jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2019). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2013). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Isniati, Fajriansyah. (2019). *Manajemen Strategik: Intisari Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Handayadiningrat, S. (2002). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.

Mustafa, B. (2001). *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 2. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Pamudji. (2009). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Adminisrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rachmat. (2014). *Manajemen Strategik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, U. (2003). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset.

Solihin, I. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Bandar Maju.

Syafiie, I. K. (2016). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafri, W. (2012). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana

B. Jurnal

Indri Dwi Enggar Sari, Setyaningsih Endang Larasati. (2018). *Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang*. ejournal Undip, Vol. 7, Nomor 2.

Wulandari Asril, Thalita Rifda Khaerani. (2017). *Strategi Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*. ejournal Undip, Vol. 6, Nomor 2.

Nurmayanti, S. (2018). *Manajemen Strategi di Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang*. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.

C. Dokumen

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34 ayat (1).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 5 Ayat (2).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat Pasal 16 Ayat (1).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.

Dokumen Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2012, 2017, 2018, 2019 dan 2020 (*softcopy*).

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 dan 2020 (*softcopy*).

Rekap Klien UPT Puskesmas

D. Dokumen pendukung lainnya.

1. Digital Reference – Internet:
<https://ejournal3.undip.ac.id/>
<http://eprints.untirta.ac.id/>
<https://scholar.google.co.id>
<https://www.dinsosnangkis.bandung.go.id>
(diakses 07 Juni 2021)